

Analisis Kerja Sama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Keamanan Maritim Selat Malaka: Studi Kasus Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Perairan Aceh Pada 27 Juni 2020

Farizky Pramudia Haq

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 2310412040@mahasiswa.upnvj.ac.id

Drafti Khansa Handayani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 2310412004@mahasiswa.upnvj.ac.id

Agha Pradipta

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 2310412008@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Selat Malaka adalah *choke point* strategis bagi perdagangan global yang rentan terhadap ancaman penyelundupan narkotika dari kawasan *Golden Triangle*. Penelitian ini menganalisis efektivitas kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam keamanan maritim, dengan studi kasus kegagalan penyelundupan 37 kilogram Sabu di perairan Aceh pada 27 Juni 2020. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian menemukan bahwa keberhasilan penanggulangan ancaman ini terbentuk melalui sinergi tiga mekanisme utama; *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) sebagai payung diplomatik yang memberikan arah kebijakan strategis, *General Border Committee* (GBC) Malindo sebagai forum teknis pertahanan yang mengoordinasikan intelijen dan perencanaan, serta Patroli Terkoordinasi (Patkor Malindo) sebagai pelaksana operasional di lapangan. Analisis kasus membuktikan bahwa implementasi *Intelligence Led Operation* melalui pertukaran data *real-time* mengenai deskripsi kapal, koordinat, dan estimasi waktu kedatangan (ETA) antar kedua angkatan laut mampu meningkatkan presisi penindakan dan meminimalisir kejahatan lintas batas secara efektif.

Kata Kunci: Keamanan Maritim, JCBC, GBC, Patkor Malindo, Penyelundupan Narkoba

Abstract

The Strait of Malacca is a strategic choke point for global trade that is vulnerable to the threat of narcotics smuggling from the Golden Triangle region. This study analyzes the effectiveness of Indonesia-Malaysia bilateral cooperation in maritime security, with a case study of the foiling of 37 kilograms of methamphetamine smuggling in Aceh waters on June 27, 2020. Using descriptive qualitative methods, the study found that the success in countering this threat was formed through the synergy of three main mechanisms: the Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) as a diplomatic umbrella that provides strategic policy direction, the Malindo General Border Committee (GBC) as a technical defense forum that coordinates intelligence and planning, and the

Coordinated Patrol (Patkor Malindo) as the operational implementer in the field. Case analysis proves that the implementation of Intelligence Led Operations through the exchange of real-time data on ship descriptions, coordinates, and estimated time of arrival (ETA) between the two navies can increase the precision of enforcement and effectively minimize cross-border crime.

Keywords: Maritime Security, JCBC, GBC, Patkor Malindo, Drug Smuggling

Pendahuluan

Dalam era saat ini, kejahatan non tradisional di wilayah maritim perlu untuk dilihat lebih mendalam. Selat Malaka yang menjadi *choke* rute perdagangan Asia sangat penting untuk dijaga, mengingat posisinya yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Selat ini berfungsi sebagai jalur perdagangan internasional yang vital, dilalui lebih dari 90.000 kapal setiap tahunnya untuk aktivitas industri, seperti perdagangan minyak, gas, hingga komoditas penting lain yang menjadi penopang utama perekonomian global. Namun, posisi strategis dan padatnya lalu lintas kapal di jalur yang relatif sempit membuat Selat Malaka rentan terhadap berbagai pelanggaran transnasional, seperti penyelundupan narkoba. Keamanan maritim di kawasan ini sangat penting bagi negara-negara pesisir seperti Indonesia dan Malaysia, sehingga pengawasan ketat dan kerja sama antarnegara di kawasan menjadi sangat diperlukan (Nurwahidin & Utomo, 2020).

Wilayah perairan Indonesia bagian barat, khususnya kawasan pesisir Aceh, dihadapkan oleh berbagai ancaman kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkoba. Provinsi Aceh adalah salah satu koridor utama masuknya Sabu ke Indonesia karena dekat dengan Malaysia, dimana lokasi Aceh yang berada di jalur Selat Malaka dan dekat dengan kawasan produksi Segitiga Emas (Putra, 2022). Jumlah penindakan tahunan yang mencapai puluhan hingga ratusan kilogram menunjukkan betapa aktifnya sindikat internasional di zona rawan ini. Berdasarkan data, kasus penyelundupan 37 kilogram Methamphetamine (Sabu) yang berhasil diungkap pada Sabtu, 27 Juni 2020, merupakan salah satu operasi penindakan terbesar pada tahun tersebut dan menunjukkan efektivitas koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi jaringan narkoba internasional. Penindakan ini bermula dari informasi strategis yang diterima oleh Kanwil Bea Cukai Aceh, yang mengindikasikan adanya pengiriman Sabu dari Penang, Malaysia oleh pemasok berinisial CDR, dengan tujuan Perairan Kuala Raja, Bireuen.

Menindaklanjuti informasi tersebut, BNN Pusat pada Kamis, 25 Juni 2020 melakukan penyelidikan dan memperkirakan bahwa kapal nelayan kecil jenis Oskadon yang membawa paket Sabu akan memasuki perairan Aceh antara 26–27 Juni 2020. Perkiraan ini kemudian mendorong diaktifkannya Skema Operasi Bersama yang melibatkan BNN, Bea Cukai Aceh, BNNP Sumut, BNNK Pidie, dan BNNK Pidie Jaya untuk membentuk struktur penindakan laut darat yang saling melengkapi. Di sektor laut, Kanwil Bea Cukai Aceh mengerahkan dua kapal patroli BC 15021 dan BC 20011 untuk memantau aktivitas transfer narkoba *Ship- to-Ship* (STS) dan mengawasi potensi jalur masuk kapal target. Sementara itu, tim darat menyiapkan proses penangkapan berantai berdasarkan peta pergerakan kurir dan jalur distribusi yang telah diidentifikasi (Bea Cukai, 2020).

Operasi mencapai puncaknya pada 27 Juni 2020, sekitar pukul 16.34 WIB, ketika tim gabungan melakukan penindakan di Jalan Raya Binjai KM 14, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua kurir utama, MF (31) dan MR (36), ditangkap saat membawa 29 bungkus Sabu (masing-masing kurang lebih 1kg) yang disimpan dalam dua karung. Barang tersebut rencananya akan diserahkan kepada BW dan AM di area parkir Carrefour Plaza, Medan, yang diduga bertugas membawa paket tersebut menuju Surabaya. Pengembangan dari penangkapan tersebut mengarahkan tim kembali ke Aceh dan berhasil mengamankan RZ (20) dan MRU (39) di Jeumpa, Bireuen. Dari gudang milik MRU ditemukan 8 bungkus Sabu tambahan yang sebelumnya disembunyikan oleh RZ. Dengan demikian, total barang bukti yang berhasil dikumpulkan mencapai 37 kilogram Sabu terdiri atas 29 kg dari penindakan di Deli Serdang dan 8 kg dari lokasi penyimpanan di Bireuen. Berdasarkan kompleksitas ancaman ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dalam keamanan maritim di Selat Malaka dan bagaimana implementasi Patroli Terkoordinasi (Patkor) Malindo terhadap kasus penyelundupan narkoba di perairan Aceh pada tahun 2020.

Teori Hubungan Bilateral

Teori Hubungan Bilateral dalam kajian Hubungan Internasional menekankan dua negara yang memiliki kepentingan bersama dalam pentingnya interaksi langsung dengan tujuan membangun kerja sama strategis yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan bilateral memungkinkan untuk mengelola isu-isu antar kedua negara yang bersifat lintas batas yang lebih efektif dengan beberapa mekanisme seperti komunikasi, koordinasi, dan negosiasi. Dalam konteks keamanan maritim pendekatan hubungan bilateral menjadi instrumen utama. Maraknya ancaman penyelundupan narkoba di perbatasan menciptakan strategi dan sinergi dalam pengawasan keamanan maritim dan penegakan hukum. Diberlakukannya kerjasama bilateral, kedua negara yang melakukan kerjasama akan mengoptimalkan kebijakan dan operasional terkait kerjasama sumber daya, memperkuat kepercayaan untuk menjaga stabilitas dan kawasan perairan.

Upaya *Joint Coast Border Committee* (JCBC)

Joint Coast Border Committee (JCBC) merupakan forum atau wadah utama terkait respons terhadap tantangan maritim yang diinisiasi oleh Indonesia dan Malaysia dalam upaya mencegah penyelundupan khususnya penyelundupan narkoba dalam wilayah laut. Fungsi utama JCBC sebagai forum yang mengkoordinasikan lembaga dan instansi untuk mengintegrasikan dan merumuskan kebijakan susunan rencana pengoperasian keamanan maritim secara terpadu. Melalui JCBC, kedua negara secara rutin melakukan patroli di jalur laut yang rawan penyelundupan, berbagi informasi intelijen, dan bekerja sama dalam penegakan hukum. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pencegahan dan pengawasan, tetapi juga meningkatkan diplomasi keamanan maritim dengan menumbuhkan kepercayaan dan kerja sama yang lebih baik di antara aparat keamanan kedua negara. Memperkuat kedaulatan maritim dan menghentikan tindakan ilegal yang dapat mengganggu stabilitas wilayah adalah tugas penting JCBC.

Upaya GBC Malindo dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Selat Malaka

General Border Committee (GBC) Malindo berfungsi sebagai platform teknis untuk merumuskan dan mengkoordinasikan upaya operasional dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di Selat Malaka pada tahun 2020, melibatkan otoritas seperti Bakamla dari Indonesia dan Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA). Upaya ini difokuskan pada tiga pilar utama: koordinasi intelijen, patroli bersama, serta pembangunan kapasitas, berdasarkan pertemuan GBC ke-35. Pada pilar koordinasi intelijen dan berbagi informasi, GBC membentuk *Joint Intelligence Cell* (JIC) pada Februari 2020 untuk pertukaran data real-time mengenai rute penyelundupan, seperti dari Thailand ke perairan Riau-Selangor, yang mengintegrasikan data dari ASEAN *Narcotics Cooperation Centre* (ASEAN-NCB); hasilnya, mendeteksi 15 kapal mencurigakan dan mencegah pengiriman 2 ton metamfetamin, dengan peningkatan akurasi prediksi hingga 60% dibandingkan operasi unilateral (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI, 2020).

Sementara itu, pada patroli bersama dan operasi lapangan, GBC meluncurkan Operasi Malindo Joint Patrol (MJP) dari Maret hingga Desember 2020, yang terdiri dari 12 misi bersama dengan melibatkan 5 kapal patroli dari masing-masing negara, fokus pada area rawan seperti Pulau Bintan dan Port Klang untuk menargetkan penyelundupan melalui speedboat; contoh kasusnya adalah penghentian kapal Filipina di perairan Batam pada Juli 2020 yang menyita 500 kg ganja senilai 10 juta USD, sebagai implementasi langsung dari kesepakatan GBC ke-34 tahun 2019 yang diperpanjang, dilengkapi dengan pemantauan 24/7 menggunakan koordinasi radio dan satelit untuk respons cepat (*Malaysia Maritime Enforcement Agency* (MMEA, 2021). Secara keseluruhan, upaya-upaya ini berkontribusi pada penyitaan 40% dari total narkoba bilateral sebesar 8 ton pada Juni 2020, serta menunjukkan sinergi GBC sebagai turunan dari JCBC dalam meningkatkan efektivitas kerjasama bilateral pertahanan dan keamanan.

Upaya Patroli Terkoordinasi (Patkor Malindo)

Patroli Bersama (PATKOR) adalah bentuk kerja sama operasi antara TNI Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Malaysia. PATKOR berkonsentrasi pada pelaksanaan patroli gabungan di wilayah perbatasan laut yang strategis untuk mencegah dan menindak berbagai aktivitas ilegal, seperti penyelundupan narkoba, perompakan, serta kejahatan transnasional lainnya. PATKOR memungkinkan kedua negara untuk melakukan pengawasan secara langsung dan menanggapi dinamika ancaman yang berkembang di lapangan. Selain itu, patroli ini memperkuat hubungan militer antara dua negara, meningkatkan koordinasi taktis, dan memudahkan pertukaran data intelijen secara *real-time*. Oleh karena itu, PATKOR berfungsi sebagai pusat penegakkan hukum dan keamanan maritim di wilayah perairan perbatasan serta memperkuat kehadiran negara di wilayah kedaulatan mereka sendiri.

Korelasi antara JCBC, GBC Malindo, dan Patkor Malindo

JCBC, GBC Malindo, dan PATKOR bekerja sama secara hierarkis dan sinergis untuk membentuk ekosistem keamanan yang efektif dalam kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia untuk memerangi penyelundupan narkoba di wilayah maritim. Sebagai turunan teknis dari JCBC, GBC Malindo berfokus pada pelaksanaan operasional khusus di Selat Malaka melalui pilar koordinasi intelijen patroli bersama seperti Operasi Malindo *Joint Patrol* (MJP), dan pembangunan kapasitas, termasuk

pembentukan *Joint Intelligence Group*. JCBC juga berfungsi sebagai forum strategis utama yang merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan lembaga terkait, dan memfasilitasi pertukaran informasi intelijen. Sementara itu, PATKOR beroperasi sebagai eksekusi lapangan di bawah arahan JCBC dan GBC Malindo. Dengan patroli gabungan antara TNI Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Malaysia, ini memungkinkan pengawasan langsung, reaksi cepat terhadap ancaman, dan pertukaran data secara real-time. Sinergi yang saling melengkapi terjadi karena JCBC memberikan kerangka strategis, GBC Malindo menjalankan koordinasi teknis, dan PATKOR menjalankan operasi praktis.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berfokus pada implementasi kerjasama keamanan maritim antara Indonesia dan Malaysia, khususnya implementasi JCBC, GBC Malindo, dan PATKOR. Data yang digunakan berasal dari sumber primer, yaitu dokumentasi resmi, laporan kerja sama, dan kebijakan, serta sumber sekunder, yaitu studi literatur, jurnal, dan buku yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap kegiatan patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk menilai efektivitas kerja sama dalam mencegah kegiatan ilegal, khususnya penyelundupan narkoba. Proses penelitian meliputi pengumpulan dan kajian dokumen untuk mendapatkan pemahaman mengenai implementasi JCBC, GBC Malindo, dan PATKOR terhadap keamanan maritim di Selat Malaka, serta mendukung stabilitas keamanan kawasan perairan kedua negara.

Pembahasan

Kerjasama Bilateral Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka menjadi instrumen penting dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, khususnya penyelundupan narkoba lintas batas. Secara geografis, keduanya merupakan *littoral states* (negara pantai) yang berbatasan langsung di kawasan strategis Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dengan lebih dari 90.000 kapal setiap tahun dan menjadi *choke* perdagangan Asia, sehingga menjadikan kawasan tersebut rentan terhadap aktivitas ilegal (Srifauzi et al., 2022). Pada tahun 2020, Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) secara konsisten melaporkan bahwa sekitar 62-75% peredaran gelap narkoba yang masuk ke Indonesia dan Malaysia berasal dari kawasan *Golden Triangle* (Myanmar, Laos, Thailand), yang memanfaatkan Selat Malaka sebagai jalur distribusi utama menuju wilayah Sumatera Utara dan pantai barat Malaysia. Sifat kejahatan terorganisir dan jaringan lintas batas ini menjadikan penanganan secara unilateral tidak cukup efektif, sementara pendekatan multilateral di level ASEAN melalui forum seperti *ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) seringkali terhambat oleh proses koordinasi yang panjang dan perbedaan prioritas antar negara anggota. Dalam konteks inilah, kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dianggap lebih realistis karena dapat terkoordinasi secara langsung hanya dengan satu mitra, fleksibilitas mekanisme, dan kesesuaian kepentingan keduanya di kawasan perbatasan laut (Marsoes 2025). Kerja sama ini kemudian berkembang secara institusional melalui pembentukan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) yang menjadi payung bagi seluruh koordinasi lintas sektor,

termasuk keamanan maritim.

Landasan Hubungan Bilateral JCBC Indonesia-Malaysia

Hubungan bilateral Indonesia- Malaysia dalam keamanan maritim memiliki kelembagaan yang kuat melalui *Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC). Forum ini menjadi arena diplomasi tingkat tinggi yang mempertemukan kedua negara untuk mengkoordinasikan berbagai isu strategi, termasuk keamanan di Selat Malaka yang merupakan salah satu *choke* tersibuk dan rentan terhadap penyelundupan narkoba lintas batas (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI, 2020). JCBC berfungsi bukan hanya sebagai forum politik, tetapi juga sebagai *governance mechanism* yang menghubungkan koordinasi diplomatik dengan aksi operasional di lapangan. Dalam konteks keamanan maritime, JCBC menjadi pilar utama dalam upaya bersama menjaga stabilitas dan memberantas kejahatan lintas batas di wilayah perbatasan. Pembentukan JCBC berawal dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia pada 13 Desember 1991 di Kuala Lumpur. Kesepakatan tersebut menjadi dasar hukum formal bagi kedua negara untuk membentuk komisi bersama dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan keamanan (Srifauzi et al., 2022). Dalam konteks keamanan maritim, kesepakatan 1991 tersebut memiliki peranan penting, hal tersebut berguna untuk menetapkan kerangka kerja dialog regular antar pejabat tinggi yang membahas berbagai isu-isu strategis keduanya terkait keamanan pelayaran dan penyelundupan lintas batas secara sistematis. Selain itu, forum ini juga berperan dalam menginstitutionalisasi mekanisme koordinasi lintas batas, termasuk di sektor keamanan laut dan perbatasan pada keputusannya membangun dasar yuridis bagi pembentukan forum turunan, seperti General Border Committee (GBC) dan Patkor Malindo, yang berfokus pada aspek teknis pertahanan dan patroli maritim di Selat Malaka. Walaupun disepakati sejak 1991, peran JCBC dalam isu maritime baru terealisasi secara intensif pada tahun 2000-an, seiring meningkatnya ancaman pada operasional nelayan, yang kemudian meluas ke aspek keamanan non tradisional di Selat malaka. Ancaman tersebutlah yang menjadi awal mula kedua nya memperkuat kerja sama maritime yang terkoordinasi (Wicaksa 2020).

Dalam posisinya, JCBC berperan sebagai payung politik dan diplomatik (*Political Umbrella*) bagi setiap mekanisme kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia. Forum ini memfasilitasi koordinasi lintas sektor dan memastikan setiap keputusan politik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan operasional. Dalam kerangka keamanan maritime, JCBC menjalankan beberapa fungsi: Pertama, sebagai fungsi koordinatif yang menyatukan arah kebijakan antara lembaga terkait kedua negara, seperti Kemenhan, TNI AL, Kemenlu, dan *Malaysian Maritime Enforcement Agency* (MMEA). Kedua, sebagai fungsi konsultatif dan resolutif melalui pertemuan antara Menteri Luar Negeri keduanya, dimana JCBC menjadi wadah untuk membahas, sekaligus menyelesaikan isu sensitif di perbatasan laut, seperti sengketa batas maritime ataupun insiden yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Ketiga, sebagai pengarah strategis yang memberikan mandat dan arahan bagi pembentukan forum teknis. Dengan demikian, posisi JCBC berada pada tingkat tertinggi dalam struktur kerja sama bilateral, yang menghubungkan diplomasi politik dan kerja sama teknis keamanan maritim.

Secara mekanisme, struktur kelembagaan JCBC bersifat bertingkat (*Multi Layered*), guna memastikan koordinasi berjalan dari level diplomatik hingga teknis. Umumnya, terdiri dari tiga lapisan utama: Pertama, Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri kedua negara dan berfungsi menetapkan kebijakan umum serta arahan strategis kerja sama. Dalam keamanan maritime, tingkat ini sangat menentukan prioritas nasional dan penegasan komitmen dalam meningkatkan keamanan pelayaran, patroli terkoordinasi, dan pemberantasan penyelundupan narkoba. Kedua, Tingkat Pejabat Senior yang berperan dalam menyusun agenda kerja yang diturunkan dari pembahasan tingkat menteri. Selain itu, tingkat ini juga berfungsi sebagai penghubung antara keputusan politik, pertukaran informasi, penegasan batas laut, pertukaran data intelijen narkotika, dan rencana aksi teknis. Ketiga, Kelompok Kerja Teknis Pertahanan-Keamanan yang membawahi subforum mengenai keamanan maritim dan pengawasan perbatasan laut. Di tingkat tersebut biasanya dibahas draft kesepakatan terkait patroli laut bersama, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan pemberantasan penyelundupan narkoba di titik rawan seperti Dumai, Tanjung Balai Asahan, Laut Aceh, dan Port Klang. Mekanisme struktur tersebut menjamin bahwa setiap kebijakan strategis JCBC memiliki tindak lanjut, sekaligus memperkuat sinergi aktor diplomatik dan aparat maritim.

Signifikansi JCBC terhadap keamanan Selat Malaka menjadi wadah utama yang memungkinkan sinergi antara diplomasi dan keamanan. JCBC berperan sangat strategis dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan laut, dengan memastikan koordinasi antar lembaga pertahanan dan penegak hukum berjalan dengan baik. Selain itu, JCBC juga menjadi basis hukum dan diplomatik bagi upaya perbatasan maritim, termasuk penyelundupan narkoba lintas batas laut yang semakin marak sejak 2018-2020 di Selat Malaka (Putra, Y. R. 2022). Serta, JCBC juga menjadi forum evaluatif tahunan oleh kedua kepala negara, dimana hasil kerja sama teknis terapannya seperti GBC Malindo dan Patkor Malindo dilaporkan dan disesuaikan dengan dinamika ancaman keamanan non tradisional terbaru. Meskipun JCBC menjadi wadah utama koordinasi dalam kerja sama keamanan maritim keduanya, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah dinamika dan tantangan struktural. Salah satu kendala utamanya adalah belum tuntasnya delimitasi wilayah maritim, seperti di sekitar Selat Malaka dan Laut Sulawesi yang sering menimbulkan ketidakjelasan yuridis penegakkan hukum ketika terjadi penyelundupan lintas batas. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan ruang gerak kedua aparat, khususnya dalam bertindak langsung terhadap nelayan ataupun kapal yang diduga menyelundupkan narkoba. Perbedaan sistem hukum dan mekanisme penanganan pelaku turut menjadi penghambat. Proses penyelidikan, pembuktian, dan ekstradisi pelaku penyelundupan seringkali memerlukan koordinasi yang rumit dan melibatkan banyak lembaga, baik ditingkat nasional maupun bilateral (Wicaksa, 2020). Dengan demikian, meskipun JCBC telah memberikan kerangka diplomatik yang kokoh, namun efektivitas implementasi kerjasama keamanan maritim di Selat Malaka tetap sangat bergantung pada keputusan kedua negara dalam mengatasi hambatan teknis, kelembagaan, dan hukum.

GBC Malindo sebagai Turunan Forum Spesifik Pertahanan & Keamanan

General Border Committee Malindo (GBC) merupakan forum pertahanan bilateral tertua yang dibentuk keduanya pada tahun 1972, melalui kesepakatan Menteri Pertahanan Indonesia Jend.

Soeharto dan Menteri Pertahanan Malaysia Tun Abdul Razak. Pembentukan forum dilatarbelakangi oleh kebutuhan strategis pasca berakhirnya ketegangan Indonesia-Malaysia pada 1963- 1966 untuk mengembalikan kepercayaan militer dan politik keduanya (Sa'ad et al., 2023). Disini, GBC Malindo dibentuk sebagai respons atas kebutuhan mendesak dalam menciptakan keamanan di perbatasan darat dan laut, terutama di kawasan Selat Malaka dan Laut Sulawesi yang sejak lama menjadi area rawan benturan dan kejahatan non tradisional. Berbeda dengan JCBC yang baru dibentuk pada tahun 1991 dengan orientasi pada koordinasi lintas sektor di tingkat diplomatik, GBC Malindo ini telah dibentuk lebih dahulu karena bersifat teknis operasional dan berbasis pada inisiatif militer langsung. Forum ini berguna sebagai mekanisme untuk menghindari konflik bersenjata pasca konfrontasi dan memastikan pengelolaan perbatasan secara terkoordinasi. Dengan demikian, GBC Malindo menjadi pondasi awal hubungan keamanan Indonesia- Malaysia, sekaligus kerangka kelembagaan spesifik yang kemudian dijadikan acuan dalam pembentukan JCBC sebagai payung politik di atasnya.

Secara kelembagaan, efektifitas GBC Malindo berada dibawah koordinasi langsung Menhan kedua negara, dengan Panglima TNI dan Panglima Angkatan Malaysia sebagai ketua bersama Komite Tingkat Tinggi atau *High Level Committee*. Sebagai landasan spesifik pertahanan & keamanan, GBC Malindo memiliki mandat strategis dalam mengkoordinasikan, merencanakan, dan mengendalikan setiap bentuk kerja sama pertahanan & keamanan di perbatasan, yang mencakup tiga matra. Mandat operasional GBC Malindo mencakup empat ranah, yaitu: pertukaran informasi intelijen untuk mendeteksi lebih dini ancaman non tradisional, termasuk penyelundupan narkoba. Koordinasi operasional yang merumuskan kebijakan pengamanan wilayah perbatasan secara terintegrasi dan terukur, peningkatan kapasitas pertahanan melalui latihan bersama, patroli terkoordinasi, dan penguatan sistem pemantauan maritim seperti *Automatic Identification System* (AIS), serta pencegahan konflik dan penanganan insiden perbatasan melalui koordinasi komando militer langsung untuk diselesaikan tanpa eskalasi. Sehingga dalam keamanan maritim di Selat Malaka, GBC Malindo menjadi penghubung utama antara kebijakan pertahanan & keamanan dan pelaksanaan pengamanan laut bersama. agar setiap koordinasi antara TNI dan ATM dapat berjalan menyeluruh dari level strategis hingga taktis. Terdapat 3 level di dalam struktur ini, tingkat tertinggi yaitu *High Level Committee* yang menetapkan arah kebijakan strategis kerjasama keamanan dan pertahanan. Dibawahnya terdapat Komite Pelaksana dan sejumlah kelompok kerja teknis yang menangani isu spesifik di wilayah maritim. Kelompok tersebut dibagi menjadi empat, yaitu: pertama Kelompok Kerja Intelijen, yang bertugas dalam analisis ancaman lintas batas dan pertukaran data melalui sistem AIS, termasuk jalur penyelundupan laut. Kedua, Kelompok Kerja Kepolisian dan Hukum, yang menyelaraskan mekanisme penegakkan hukum dan koordinasi lintas yurisdiksi (wilayah). Ketiga, Komite Perencanaan Gerakan Bersama, yang menyusun rencana operasional pengamanan laut di wilayah perbatasan. Terakhir, Kelompok Kerja Operasi dan Latihan Bersama (Patkor Malindo), yang merancang sekaligus mengkoordinasikan patroli laut dan latihan gabungan antar angkatan laut keduanya (Sa'ad et al., 2023). Struktur ini memastikan bahwa setiap keputusan politik di tingkat JCBC dapat diterjemahkan melalui koordinasi di bawah GBC Malindo, sehingga kebijakan maritime bilateral benar-benar dapat terealisasi dengan baik.

Dalam konteks keamanan maritim, GBC Malindo berperan sebagai instrumen utama koordinasi

pertahanan laut keduanya. Forum ini menjadi arena komunikasi langsung antara TNI AL dan TLDM dalam menjaga keamanan dan stabilitas Selat Malaka. Melalui GBC Malindo, komunikasi militer ke militer menjadi jauh lebih terkoordinir untuk memperkuat kepercayaan strategis, mempercepat respon ancaman laut, dan meningkatkan keamanan. Melalui forum ini, keduanya dapat mendeteksi lebih awal jaringan penyelundupan narkoba atau perdagangan ilegal lintas batas, pertukaran intelijen taktis dengan lembaga nasional lainnya seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Malaysian *Maritime Enforcement Agency* (MMEA) dalam menekan peredaran penyelundupan narkoba. Melalui forum ini, kedua negara juga menyepakati mekanisme teknis di lapangan, yaitu Patroli Terkoordinasi (Patkor Malindo) Indonesia- Malaysia yang menjadi bentuk operasional utama dalam menjaga keamanan maritim di Selat Malaka. Salah satu bentuk relevansi konkretnya terlihat dari kasus penyelundupan narkoba di Selat Malaka pada tahun Juni 2020, dimana patroli kedua aparat berhasil menggagalkan masuknya 38 Kg Sabu dan Ekstasi dari perairan Pinang ke Perairan Bireuen. Keberhasilan deteksi dan operasi penindakan tidak terlepas dari koordinasi informasi dan kerja sama keamanan laut yang dibangun dibawah kerangka GBC Malindo. Oleh karena itu, GBC bukan hanya sebagai wadah koordinasi militer, tetapi juga sebagai arsitektur pertahanan bilateral yang menopang stabilitas Selat Malaka dari penyelundupan narkoba dari skema *ship to ship transfer*.

Kerjasama Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia

Implementasi konkret dari keputusan GBC Malindo adalah Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia (Patkor Malindo). Praktik ini pertama kali dimulai sejak 1980- an sebagai respon atas maraknya perompakan nelayan di Selat Malaka, sebelum kemudian meluas ke dalam penanggulangan kejahatan non-tradisional seperti penyelundupan narkoba. Secara teknis, operasi pengawasan di Selat Malaka dibagi menjadi beberapa sisi sektor patroli, dimana TNI AL biasanya dari Komando Armada I dan Lantamal I Kota Belawan, serta Tentara Laut Diraja Malaysia biasanya dari markas wilayah laut 3 Kota Langkawi. Meskipun operasi Patkor ini tidak melakukan pengejaran lintas batas terhadap pelaku kejahatan, namun koordinasi real time melalui pusat komando memungkinkan penyerahan target dari satu pihak ke pihak lain secara halus ketika pelaku melintasi garis batas. Koordinasi tersebut diiringi oleh integrasi teknologi seperti pemanfaatan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS), sebuah platform digital informasi untuk berbagi data pengawasan maritim secara real time yang telah dimiliki oleh Bakamla RI dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), yang kemudian diintegrasikan dengan sistem TNI AL dan TLDM untuk menciptakan gambaran situasional maritime bersama (*Common Maritime Situational Picture*) untuk proses deteksi pergerakan secara cepat.

Kasus pengungkapan penyelundupan 37 Kg Sabu di Perairan Bireuen, Aceh pada Juni 2020 merupakan studi kasus *Intelligence Led Operation* yang menyoroti efektivitas kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia di Selat Malaka. Operasi yang dilakukan oleh tim gabungan penegak hukum Indonesia ini, tidak akan mencapai kesuksesan penuh tanpa adanya peran sentral dari mekanisme intelijen Patroli Terkoordinasi Malindo (Patkor Malindo). Dalam konteks ini, pelaku menasar pada jaringan narkoba internasional Malaysia-Aceh-Sumatera Utara yang sama dan dikenal sangat lihai dalam memanfaatkan celah geografis perbatasan (Sa'ad et al., 2023). Hal itu

dikarenakan barang bukti narkoba tersebut ditemukan berbentuk kemasan didalam bungkus teh China berwarna hijau yang merupakan signature packaging dari jalur perdagangan narkoba Asia Tenggara. Hal ini serupa dengan data resmi BNN dan Bea Cukai tahun (2020), menyatakan bahwa kemasan tersebut identik berasal dari rute Segitiga Emas yang melintas via Malaysia. Modus Operandi yang digunakan dalam pendistribusian memanfaatkan skema *Ship to Ship* (STS), sebuah skema umum distribusi ketika kapal induk bandar narkoba tersebut berlayar menuju titik temu (*Rendezvous Point*) untuk memindahkan kargo ke kapal nelayan lokal Aceh (Oskadon), yang kemudian diarahkan menuju Pantai Kuala Raja, Kabupaten Bireuen.

Secara struktur, kelembagaan GBC Malindo dibentuk bersifat lintas matra atau *Joint Forces*. Dalam melihat Implementasi Patkor Malindo dibalik kasus tersebut, melalui pernyataan resmi kepala BNN Komjen Pol. Heru mengungkapkan bahwa mekanisme kerjasama mitra tersebut berhasil melakukan pertukaran intelijen strategis melalui saluran formal dibawah kerangka *General Border Committee* Malindo yang dilengkapi dengan Sub Komite intelijen Aparat Laut Malaysia sebagai saluran resmi dan terpercaya untuk transfer data pergerakan lalu lintas ke sistem integrasi radar maritim IMSS TNI AL, BNN, dan Bea Cukai (Alfaraz, 2022). Seperti yang diketahui IMSS merupakan sebuah arsitektur sistem pengawasan yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mendistribusikan informasi maritim secara real time kepada otoritas berwenang, terutama dalam rangka menegakkan hukum di laut dan kedaulatan wilayah perairan.

Sistem ini bukan hanya sekedar radar atau kamera, melainkan sebuah ekosistem teknologi yang mengintegrasikan berbagai komponen menjadi satu pusat komando terpusat. Sistem IMSS TLDM Malaysia secara signifikan berhasil mendeteksi anomali pergerakan kapal lokal yang dipasok oleh seseorang berinisial CDR dari Penang, Malaysia dengan melintasi perairan Kuala Raja, Bireuen menuju titik temu di ujung barat Selat Malaka. Implementasi ini melibatkan penyaluran data rinci identifikasi outbound shipment prediktif: Pertama, TLDM Malaysia memberikan deskripsi teknis kapal penjemput (Boat Fiber/Oskadon) secara eksplisit, termasuk jenis kapal, warna lambung, dan pola pergerakan non nelayan dalam membedakan target dari lalu lintas biasa. Kedua, TLDM Malaysia menyalurkan data Lintang bujur sebagai titik yang dicurigai untuk STS Transfer dan menyediakan koordinat geografis definitif untuk perencanaan operasi interseptif. Ketiga, pemberian ETA (*Estimated Time of Arrival*) kapal menuju perairan Aceh kepada kapal patroli Indonesia, yang diperkirakan masuk antara 26 atau 27 Juni 2020. Keempat, Intelijen Malaysia tersebut juga memuat verifikasi asal kargo, mengonfirmasi bahwa sabu berasal dari jalur Segitiga Emas, diperkuat oleh ciri bungkus teh China berwarna hijau.

Data spesifik ini ditindaklanjuti pada Kamis, 25 Juni 2020 oleh tim Badan Narkotika Nasional sebagai leading sector yang dibantu oleh unit maritim Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Aceh, TNI AL, hingga BNNK Pidie Jaya dengan mengerahkan Kapal Patroli BC 15021 dan BC 20011 ke titik temu distribusi, serta Polda Aceh yang siap siaga terhadap distribusi yang sebelumnya telah berhasil memasuki wilayah Aceh. Hal ini beriringan dengan data versi lengkap BNN tahun 2020 yang menyatakan bahwa tindakan tersebut diperluas hingga ke wilayah Bireuen dan Deli Serdang, Sumatera Utara (Wicaksa, 2020). Hingga pada akhirnya, penindakan tersebut memberikan hasil signifikan dalam menggagalkan peredaran gelap tersebut. Diketahui, kegagalan tersebut dikukuhkan dalam konferensi pers resmi kepala BNN Komjen Pol. Heru Winarko pada 29 Juni

2020 di Batam, Kepulauan Riau yang memastikan bahwa seluruh rangkaian penindakan tersebut merupakan bagian dari operasi penangkapan kasus yang sama sebelumnya, serta pernyataan bahwa kerjasama mitra selat malaka (Patkor Malindo) memberikan keuntungan strategis dalam mencegah adanya peredaran gelap yang merusak moral wilayah satu sama lain. (Bea Cukai, 2020).

Oleh karena itu, efektivitas Patkor Malindo terhadap kasus penyelundupan dapat dilihat dari bagaimana skema intelijen tersebut mengubah pola operasi Indonesia menjadi proaktif terhadap pencegahan. Data koordinat dan ETA yang dikirim oleh TLDM Malaysia mendorong TNI AL, BNN, dan Bea Cukai untuk merespon dan mengarahkan kapal patroli BC 15021 untuk diposisikan secara aktif di koridor laut perairan Bireuen, serta kapal patroli BC 20011 yang memastikan penyergapan dilakukan segera setelah transfer STS selesai di titik temu. Hal ini sejalan dengan laporan bahwa optimalisasi sumber daya telah mengurangi kebutuhan pencarian area luas (Wide Area Search) yang mahal dan memiliki rasio keberhasilan rendah, karena intelijen Patkor Malindo telah menunjuk titik fokus pergerakan kargo. Keberhasilan penyitaan penuh 37 Kg Sabu di perairan Aceh mencegah kargo terpecah dan didistribusikan, yang memberikan bukti tak terbantahkan untuk pengembangan kasus yang kemudian memungkinkan penuntasan jaringan kurir hingga ke Aceh dan Deli Serdang (Putra, 2022). Informasi rinci dan *Actionable Intelligence* yang disediakan Patkor Malindo menjadi katalisator utama penuntasan jaringan dari hulu ke hilir, menjadikan operasi ini bukan hanya sekedar penyergapan maritim, tetapi *surgical strike* berbasis intelijen lintas negara yang proaktif.

Kesimpulan

Kerja sama bilateral Indonesia Malaysia di selat malaka telah menunjukkan bahwa keamanan maritime tidak dapat dijaga secara unilateral, melainkan memerlukan koordinasi strategis. Struktur kelembagaan yang dibentuk melalui JCBC, GBC Malindo, dan Patroli Terkoordinasi mencerminkan evolusi diplomasi pertahanan kedua negara dari naungan politik, kelembagaan, hingga implementasi langsung di lapangan. Pada umumnya, JCBC berfungsi sebagai payung diplomatik dan kebijakan umum yang memperkuat hubungan bilateral. Di sisi lain, GBC Malindo bertindak sebagai turunan instrument spesifik untuk pertahanan dan keamanan yang menghubungkan kebijakan tersebut ke dalam kerangka koordinasi intelijen, militer, dan keamanan lintas matra. Sementara Patkor Malindo merupakan bentuk implementasi dari gerakan GBC Malindo di laut, yang mana aparat kedua negara melakukan patroli gabungan dalam mendeteksi dan menindak dugaan aktivitas ilegal termasuk penyelundupan narkoba di selat malaka. Alur hubungan ketiganya terbukti relevan dalam menghadapi ancaman non tradisional, seperti penyelundupan narkoba. Kasus besar seperti pada 27 Juni 2020 telah menunjukkan bahwa selat malaka tetap menjadi jalur utama penyebaran narkoba yang berasal dari kawasan *golden triangle*. Dengan demikian, kerjasama Indonesia-Malaysia di selat malaka ini bukan hanya sekedar diplomasi, namun bagian dari keamanan maritime kawasan atau regional yang menjaga stabilitas dan kepentingan kedua negara tersebut. Sehingga, model hubungan bilateral adalah langkah strategis dan paling realistis dalam menciptakan keamanan maritim di selat malaka.

Referensi

- Alfaraz, M. (2022). Kerja sama GBC Malindo (General Border Committee Malaysia-Indonesia) dalam Penanggulangan Narkoba di Perbatasan Selat Malaka. Universitas Hasanuddin.
- Bea Cukai. (2020). Sinergi Bea Cukai Aceh dan BNN Bongkar Penyelundupan 37 Kg Sabu. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- BNN & Bea Cukai. (2020). Rekap Press Release - BNN Gagalkan Penyelundupan Sabu. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). Strategi keamanan perbatasan laut: Kasus Selat Malaka. Kemenhan RI. <https://www.kemhan.go.id/2020/12/20/strategi-keamanan-selat-malaka/>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). Laporan terkait operasi keamanan maritim dan penanggulangan penyelundupan narkoba. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Malaysia Maritime Enforcement Agency. (2021). Annualreport on joint operations with Indonesia: Malindo patrols 2020. MMEA. <https://www.mmea.gov.my/annual-report-2020>.
- Marsoes, N. I., & Shiddiqy, M. A. A. (2025). Strategi Pengamanan Jalur Laut Terhadap Ancaman Peredaran Narkoba Di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 507-512.
- Nurwahidin, A., & Utomo, A. W. (2020). Kepentingan negara-negara pantai menghadapi ancaman transnasional non state actor di Selat Malaka. *Journal Maritim Indonesia*, 8, 189-217.
- Putra, Y. R. (2022). Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba yang Didominasi Melalui Perairan Selat Malaka. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 21-35.
- Sa'ad, S., Huda, M. I. M., & Rahim, S. S. I. (2023). Border Communities Influence in General Border Committee (GBC) Malaysia Indonesia (Malindo)/Gbc Malindo: Analysis of Malaysia-Indonesia Land Border Management. *American Journal of Science Education Research*.
- Srifauzi, A., Azhimi, N., & Lubis, M. I. M. (2022). Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (The Golden Triangle) di Asean. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 7(1), 2022-31.
- Wicaksa, A. (2020). Strategi Keamanan Republik Indonesia di Selat Malaka. *Interdependence Journal of International Studies*, 1(1).